



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BIMA
UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FITHRATULLAH
2. Jabatan : PENGAWAS PENYELENGGARAAN NEGARA URUSAN PEMERINTAHAN
3. NHK : 485859

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 590.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/41 m2 di KAB / KOTA KOTA BIMA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 85.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 189 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 505.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 150.100.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 9.600.000
3. MOBIL, DAIHATSU I47 TERIOS F700RG TX MT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 12.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 30.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 12.570.000

Sub Total Rp. 795.670.000

III. HUTANG Rp. 36.680.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 758.990.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.